

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Hakim

Tugas hakim tidak pernah dapat dipisahkan dari sistem hukum. Hakim memutuskan kasus, membangun argumentasi hukum untuk menjustifikasi putusannya, berdasarkan sistem hukum. Gagasan tentang apa yang seharusnya hakim kerjakan di ruang pengadilan ketika memutuskan kasus, yaitu memberikan justifikasi terbaik atas putusannya, bersumber lebih dari satu teori.¹³

Sesuai dengan ketentuan umum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman¹⁴ yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004¹⁵ Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

¹³Titon Slamet Kurnia, *Op.cit* hal: 49

¹⁴Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman

¹⁵Undang-Undang RI No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 05 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tata Usaha Negara, syarat untuk menjadi hakim PTUN adalah sebagai berikut: Menurut ayat 1 dijelaskan bahwa seorang hakim PTUN haruslah warga negara Indonesia, beragama, taat kepada Pancasila dan UUD 1945, seorang sarjana Hukum, memiliki jasmani dan rohani yang sehat, serta bukanlah bekas anggota organisasi terlarang.

Untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.¹⁶ Hakim tata Usaha Negara adalah pejabat yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di dalam lingkungan PTUN. Secara Umum memang kewenangan hakim adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa.¹⁷

2. Putusan Hakim

Sesuai ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg. juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,¹⁸

¹⁶Udiyo Basuki, *Pedoman Beracara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: SUKAPRESS, 2013), hlm. 3.

¹⁷Miftahul jannah, 2015. *Kewenangan Hakim Pengadilan tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian di Indonesia*. Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Vol.1, No.1. Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal. 156

¹⁸*Op.cit.* Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

bahwa apabila pemeriksaan perkara telah selsesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan di persidangan dianggap selesai apabila telah melakukan pemeriksaan yang diawali dengan proses upaya perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR, yang diperluas melalui proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Apabila proses upaya perdamaian, baik di persidangan maupun mediasi yang dinyatakan gagal, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat dan duplik tergugat.

Mahkamah Agung telah menentukan pilihan agar hakim dalam membuat putusan berpedoman kepada 3 hal yakni:

- a. Unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama.
- b. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
- c. Unsur Sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak

lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi beban referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.¹⁹

Hakim kemudian merumuskan pokok sengketa yang dilanjutkan dengan pembebanan pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR kepada para pihak. Apabila proses pembuktian yang berimbang telah selesai kemudian para pihak mengajukan kesimpulan. Pada persidangan pertama bagi tergugat apabila mengajukan eksepsi menyangkut kewenangan relatif, yaitu kewenangan mengadili berdasarkan daerah hukum masing-masing pengadilan dalam satu lingkungan yang telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya (pasal 118 HIR).²⁰

Tata cara pemeriksaan eksepsi tentang kompetensi relatif, diatur dalam pasal 125 ayat (2) dan (3) HIR Juncto Pasal 133 HIR, sebagai berikut:

- a. Eksepsi relatif harus diajukan pada persidangan pertama bagi penggugat.
- b. Eksepsi relatif, boleh dikirim bersama-sama jawaban mengenai pokok perkara tanpa dihadiri oleh tergugat (pasal 133 HIR).

¹⁹Lilik Mulyadi, 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta:Ikahi, hlm. 25.

²⁰Syarif Mappiasse, *Op.cit.* Hal 34

- c. Eksepsi relatif harus diputuskan pada sidang pertama di awal persidangan bagi tergugat (pasal 135 HIR).
- d. Jika eksepsi dikabulkan, maka putusan hakim merupakan putusan akhir yang menyatakan “pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.”
- e. Jika eksepsi ditolak, maka pengadilan menyatakan diri berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dan memerintahkan kepada panitera untuk segera menyampaikan isi putusan kepada tergugat (putusan ini disebut putusan sela).
- f. Kepada kedua belah pihak diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya.²¹

Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Atau juga Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengahiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Jika tidak diatati para pihak maka putusan tersebut dapat

²¹Pasal 125 ayat (2) dan (3) HIR Juncto pasal 133 sera pasal 135 HIR

dipaksakan. Sedangkan menurut penulis bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim terhadap suatu perkara, menyelesaikan sengketa dan mengakhirinya.²²

3. Putusan Hakim Yang Baik

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, jika didalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Adapun dalam memeriksa perkara perdata, hakim bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Akan tetapi, hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak. Sistem pembuktian positif (*positive wetterlijke*) digunakan hakim dalam penyelesaian perkara perdata, di mana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan didasarkan

²²Ahmad Zarkasi, dkk, 2014, *Putusan Hakim*, diakses dari <http://ahmadzarkasyi-blog.blogspot.co.id>, pada tanggal 11 januari 2017, pukul 11.05 WIB

pada bukti-bukti formil, yaitu alat-alat bukti sebagaimana terdapat dalam hukum acara perdata.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa:²³

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24

²³Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. Hal 136

UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁴

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan pada Ayat (1) yang mana dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, kemudian pada Ayat (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945. Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menerut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan diajukan oleh hakim, dan;
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

²⁴Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998. Hlm 67.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

4. Kekuasaan Kehakiman

Yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁵ adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia sedangkan menurut Pasal 2 UU No 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa yang menjadi asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah :

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

²⁵Lihat dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut sistem UUD 1945, fungsi kekuasaan Mahkamah Agung, ialah:

- a. Melakukan kekuasaan kehakiman, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Akan tetapi DPR berperan untuk mengontrol kekuasaan Mahkamah Agung melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung, yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- b. Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.

Kemerdekaan atau independensi sudah menjadi suatu hal yang melekat bahkan menjadi salah satu sifat kekuasaan kehakiman, sebagaimana disinggung oleh Bagir Manan tentang kekuasaan kehakiman bahwa: ²⁶

²⁶Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 82

1. Kekuasaan kehakiman adalah badan yang merdeka lepas dari campur tangan kekuasaan lain,
2. Hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain, lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan, daripada pembagian kekuasaan.

Bagir Manan menunjuk pada Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS dan UUD 1950 diartikan sebagai “terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”. Kekuasaan kehakiman mengandung dua segi:

1. Hakim merdeka bebas dari pengaruh siapapun, selain kekuasaan legislatif dan eksekutif, hakim juga bebas dari pengaruh kekuasaan unsur-unsur yudisiil itu sendiri dan pengaruh dari luar pemerintahan seperti pendapat umum, pers dan sebagainya.
2. Kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya sebatas fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisiil atau pada fungsi yudisiilnya.²⁷

Implementasi Pasal 24B UUD 1945, yaitu diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung, serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna

²⁷Rahayu Prasetyaningsih, 2011. *Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*. Bandung. Jurnal Konstitusi. Vol. 8, No. 5 UNPAD. Hal 8

menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.²⁸

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, adalah :

- a. Penyelidikan dan penyidikan,
- b. Penuntutan,
- c. Pelaksanaan putusan,
- d. Pemberian jasa hukum, dan
- e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

B. Sertifikat Ganda

1. Sertifikat Hak Atas Tanah

Dilihat dari teori hukum, maka aturan-aturan hukum dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum memenuhi konsepsi aturan-aturan hukum dan keputusan, sehingga hukum terutama dalam Bidang Pengaturan dan Pengusaan Tanah dirasakan belum memenuhi tuntutan dari masyarakat yang hidup pada era reformasi ini.²⁹

Kemudian juga dikatakan bahwa pembangunan hukum (bukan pembaharuan saja) dalam pengertian ini adalah penyerasian pasangan-

²⁸Kusnu Goesniadhie S, *Prinsip Dasar Kekuasaan Kehakiman*, <http://kgsc.wordpress.com> diakses 11 Januari 2017 pukul 10.59 WIB

²⁹Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 20

pasangan nilai untuk menanggulangi apa yang tidak ada, apa yang rusak atau salah, apa yang kurang, apa yang macet dan apa yang mundur atau merosot. Adapun *law enforcement* hendaknya diartikan sebagai penanggulangan hal-hal tersebut berdasarkan suatu sistem jalinan nilai yang serasi untuk memelihara (*law as a tool of sosial control*) dan meningkatkan (*law as a tool of sosial engineering*) kedamaian pergaulan hidup manusia.³⁰ Oleh karena banyaknya permasalahan dalam bidang agraria khususnya, diperlukan upaya pembaharuan dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi.

Secara umum sertifikat hak atas tanah merupakan bukti hak atas sebidang tanah. Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997³¹ menjelaskan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Karena fungsi dari sertifikat tanah sebagai alat pembuktian yang kuat didalam pemilikan, maka sertifikat dapat menjamin kepastian hukum atas pemegang kepemilikan hak suatu tanah, kebenaran hukum atas lokasi dari tanah, batas serta luas suatu tanah. Dengan sertifikat tersebut dapat melindungi pemilik tanah asli yang namanya tercantum didalam sertifikat dari

³⁰Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali, Hal. 21

³¹Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

gangguan pihak lain serta terhindar dari permasalahan sengketa dengan pihak lain. Dengan adanya sertifikat tersebut dapat membuktikan suatu kebijakan pemerintah dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan yang meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah-tanah yang ada diseluruh Indonesia.

Sertifikat hak atas tanah merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut keputusan TUN) jika memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 angka 9 (pasal 1 angka 3 menjadi pasal 1 angka 9 pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dijelaskan bahwa

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.³²

Oleh karena sertifikat tanah adalah penetapan tertulis, maka terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan ini

³²Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

memang dihauskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya. Persyaratan tertulis ini diharuskan untuk kemudahan segi pembuktiannya.³³

Sertifikat hak atas tanah sebagai produk akhir dari pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh hukum yakni pada Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mengikat bagi para pejabat Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat atas pemilikan tanah. Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan menerbitkan sertifikat, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memerintahkan dan mewajibkan pejabat Badan Pertanahan Nasional tersebut untuk segera memperbaiki.³⁴ Mencermati masalah banyaknya gugatan sertifikat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum, serta merugikan pemilik tanah yang sebenarnya, maka pengadilan adalah jalan terakhir untuk meminta hak atas tanahnya dikembalikan kepada pemilik tanah yang sebenarnya. Pengadilan memiliki peranan untuk mewujudkan keadilan.³⁵

³³Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara tahun 1986 nomor 77, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3344).

³⁴Adrian Sutedi, *Op.cit.* Hal. 21

³⁵*Ibid.*

2. Perkara Sertifikat Ganda

Sertifikat pada dasarnya merupakan akta otentik yang menunjukkan kepemilikan tanah secara sah, tetapi pada kenyataannya terdapat sertifikat ganda yang berdampak pada terjadinya sengketa, sehingga salah satu pihak yang terlebih dahulu memiliki sertifikat mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan pihak lain yang memiliki sertifikat di kemudian hari.

Sertifikat ganda atas tanah mempunyai arti yang mana sebidang tanah memiliki dua sertifikat tanah oleh dua orang yang berbeda. Permasalahan ini ditimbulkan karena faktor-faktor yang muncul dari pihak yang menerbitkan sertifikat tanah, beberapa diantaranya seperti penerbitan sertifikat tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya dan kecerobohan/ketidakteitian petugas pendaftaran tanah. Dan juga faktor dari pihak yang mengajukan pendaftaran tanah, beberapa diantaranya seperti adanya surat bukti atau pengakuan hak yang ternyata terbukti mengandung ketidak benaran, kepalsuan atau tidak berlaku lagi, dan sewaktu dilakukan pengukuran atau penelitian di lapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah. Faktor lainnya disebabkan karena untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya.

Terbitnya dua sertifikat atas tanah atas sebidang tanah dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, mengingat sertifikat memiliki fungsi sebagai alat bukti hak atas tanah maupun hak tanggungan, dan sedangkan pemilik asli tanah dengan sertifikat ganda tersebut juga perlu diberikan jaminan hukum serta perlindungan hukum.³⁶

3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang sertifikat Asli dalam Perkara Sertifikat Ganda

Dengan demikian harus ada bentuk perlindungan hukum agar menjadi pasti siapa sebenarnya pemegang yang sah suatu hak atas tanah yang telah disertifikasikan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bisa secara preventif dan secara represif yang meliputi :

- 1) Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah memberikan perlindungan, dimana seseorang yang tercantum namanya dalam sertifikat tidak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanah setelah 5 tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata oleh pemegang hak yang bersangkutan.³⁷

³⁶Anissa Aulia dan I made Udiana. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Dengan Adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah*. Bali.Jurnal Online. Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/articleFakultas Hukum Universitas Udayana>. Hal 2

³⁷Adrian Sutedi, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 194

- 2) Peran hakim sangat dibutuhkan dalam memeriksa dan memastikan kebenaran dari keterangan dalam sertifikat. Hakim harus membuktikan, meneliti dan memeriksa asal-usul sertifikat¹⁰. Harus diselidiki bahwa orang yang mengajukan pendaftaran hak atas tanah memang berhak atas tanah tersebut, maksudnya bahwa ia memperoleh hak atas tanah secara sah dari pihak yang berwenang yang mengalihkan hak atas tanahnya, dan kebenaran dari keterangan lainnya yang tercantum dalam sertifikat. Sehingga nantinya dapat ditentukan siapa pemegang sah hak atas tanah dan ia bisa mendapatkan kepastian hukum dari kepemilikan sertifikat hak atas tanah tersebut.

C. Teori Tujuan Hukum

1. Keadilan Hukum

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³⁸ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.

³⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995 hal. 196. Dalam Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*,.

Kemudian menurut Aristoteles keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”³⁹.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.⁴⁰

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan

³⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 24.

⁴⁰ Rasjuddin Dunge, *Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan*, diakses dari <http://rasjuddin.blogspot.co.id/> pada tanggal 24 September 2017. Pukul 14.30 WIB.

prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan.

2. Kepastian Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.⁴¹

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak

⁴¹ *Ibid*

hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.⁴²

3. Kemanfaatan Hukum

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah,

⁴²*Ibid*

tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang trkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*).⁴³ Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

4. Teori Ethis

Tujuan hukum yang semata- mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukumsemata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yangtidak adil. Menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan setiap

⁴³*Ibid*

orang apa yang semestinya. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles filsuf Yunani dalam bukunya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorica* yang menyatakan hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya.⁴⁴ Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua:

Pertama, Keadilan Distributif: Yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.

Kedua, Teori Keadilan Kumutatif : Yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing.

5. Teori Utilitis⁴⁵

Tokoh dari teori ini yaitu: Jeremy Bentham, John Austin dan J.S Mill. Pencetus teori ini adalah Jeremy Bentham. Dalam bukunya yang berjudul *introduction to the morals and legislation* berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/manfaat bagi orang. Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin

⁴⁴ Anas Muhammad, *Teori Tujuan Hukum*, diakses dari <https://id.scribd.com>, pada tanggal 24 September 2017 pukul 14.11 WIB.

⁴⁵ *Ibid*

adanyakemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya (*The greatest happiness for the gratest number*) Apa yang dirumuskan oleh Betham tersebut diatas hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Sulit bagi kita untuk menerima anggapan Betham ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.

